

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui secara luas. Kemewahan tersebut suatu ketika akan punah dan hilang, jika pengelolaan hutan lindung tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang jelas (Pranata & Hamzari, 2020). Pengelolaan hutan dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Bertambahnya manusia, juga menjadi salah satu unsur penyebab adanya berkurang baku mutu ekosistem yang ada, khususnya di beberapa lingkungan yang secara langsung berdekatan dengan aktivitas manusia tersebut. Pengelolaan hutan sendiri tidak mungkin dan mustahil dilakukan oleh negara sendiri, maka perlu partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat dan mengelola hutan itu sendiri. Selama pengelolaan hutan, negara sudah mengeluarkan beberapa pola pengelolaan hutan salah satunya dengan adanya pengelolaan melalui perhutanan sosial (Anwar & Farhaby, 2022).

Penelitian terkait Program Perhutanan Sosial juga menghubungkan pengaruh program ini terhadap keberhasilan pengentasan atau pengurangan tingkat kemiskinan pada wilayah yang memperoleh program. Hasilnya menyatakan bahwa program HKm merupakan strategi penggunaan lahan yang menarik untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan dan dapat diterima oleh masyarakat pedesaan, terutama bagi para petani kecil dan tidak memiliki tanah atau lahan. Program ini telah menghasilkan sumber daya dan pendapatan yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan di atas tingkat subsisten dan membuktikan bahwa kehutanan masyarakat dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Selain penciptaan sumber daya, lapangan kerja dan pendapatan, perhutanan kemasyarakatan memainkan peran penting dalam melestarikan lingkungan dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan seperti yang terjadi di beberapa negara asia seperti Bangladesh, Vietnam, China, India dan Mexico (Yuliana, 2022).

Perhutanan Sosial sebagai konsep pemberian akses hukum pengelolaan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan telah dimulai sejak tahun 1990. Sebelumnya, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan tidak dipandang sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berperan penting dalam pengelolaan hutan. Mereka hanya dipandang sebagai tenaga kerja murah dalam kegiatan perkebunan dan kehutanan. Namun selama tahun 1990 hingga 1998, kesadaran bahwa masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat berperan aktif sebagai pengelola hutan semakin meningkat (Candra et al., 2022).

Status HKm Lestari Alam diakui pemerintah dalam Nomor: 5/L.13.P/P2T/11/2016 setelah dilakukan pengajuan surat permohonan persetujuan pengelolaan HKm oleh Ketua KTH Lestari Alam. Setelah melakukan observasi langsung ke KTH Lestari Alam, ternyata terdapat permasalahan mengenai pemindahan lokasi pada lahan garapan petani sehingga petani baru mengelola lahannya setelah beberapa tahun dari penerbitan izin SK. Oleh karena itu, HKm Lestari Alam perlu suatu preskripsi dalam pengelolaan hutan agar hasil yang didapatkan dapat optimal. Preskripsi ini sangat penting karena memberikan panduan atau rekomendasi tentang bagaimana hutan harus dikelola agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya preskripsi, pengelola hutan dapat mengambil keputusan yang lebih spesifik, terarah, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menjaga keberlanjutan ekosistem hutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

1.2 Landasan Teori

Preskripsi pengelolaan hutan adalah sejumlah kegiatan yang diimplementasikan pada suatu tegakan atau tipe tegakan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Penanaman, penjarangan, permudaan, pemanenan dan pemasaran adalah contoh kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan struktur vegetasi dan hasil kayu yang diinginkan. Elemen dasar dari preskripsi pengelolaan hutan adalah: a) Karakteristik Lahan, yang menggambarkan paket atau tipe-tipe lahan menurut lokasi, potensi tegakan, kerapatan, dan atribut-atribut lahan yang lain. b) Skedul kegiatan (*management activity schedule*) yang menggambarkan tata waktu (*timing*), metode dan sumberdaya lain yang akan dimanipulasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. c) Prediksi Hasil (*quantitative growth and yield projection*), yang menggambarkan secara numerik berapa banyak kayu yang diharapkan akan diperoleh dari penebangan komersil (kayu hasil penjarangan dan tebangan akhir daur) dari tegakan yang ada sekarang dan tegakan berikutnya dari hasil regenerasi (Molo *et al.*, 2021).

Eksistensi hutan lindung adalah suatu keberadaan yang memiliki kepentingan yang utama. Namun pada kenyataannya hutan lindung adalah salah satu kawasan terlindungi yang sangat sulit untuk dilindungi. Kesulitan paling umum adalah luas wilayah hutan lindung yang sangat besar dan sangat sulit untuk dijelajahi secara langsung (Mellyadi & Harliana 2022). Hutan lindung sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pengetahuan masyarakat terhadap status lahan kawasan hutan lindung menjadi sangat penting, agar kedepannya hutan lindung yang berfungsi melindungi kawasan budidaya tetap dapat dipertahankan (Nasruddin *et al.*, 2020).

Ketetapan dari Menteri Kehutanan Indonesia Nomor P.9/MENLHK-II/2021 perihal Hutan Kemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan jika HKm adalah Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. HKm murni menjadi hak masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan tersebut untuk sumber mata pencaharian. Tujuan dari HKm yaitu untuk

mengembangkan kapasitas/kemampuan dan memberikan akses masyarakat sekitar hutan mengelola hutan secara lestari agar terjamin ketersediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar hutan sehingga bisa mengurangi pengangguran atau mengurangi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Tentu saja hal ini bisa menjadi upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Namun pada kenyataannya pemanfaatan HKm masih menghadapi beberapa masalah di antaranya masih kurang ketatnya kebijakan tentang pemanfaatan hutan sehingga semakin banyak kerusakan sumber daya hutan yang diakibatkan karena eksploitasi, serta pendapatan masyarakat yang menurun karena semakin sulit dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan akibat eksploitasi tersebut (Perdana *et al.*, 2021).

HKm diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelola lahan hutan secara ilegal (perambahan), ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa KTH dan kopras. Masyarakat dapat mengelola lahan hutan yang sudah bertahun-tahun dikelola, dan Sebagian yang belum di kelola namun ingin turut berpartisipasi dalam program HKm, mendapatkan jatah lahan andil hutan melalui proses musyawarah bersama anggota kelompok (Andini & Masrilurrahman, 2023). Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan lestari. Perilaku mereka merupakan komponen krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Bentuk perilaku negatif masyarakat sekitar hutan mengarah pada pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan (Basir *et al.*, 2020).

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan preskripsi pengelolaan hutan lindung yang mencakup klasifikasi lahan, *schedule* aktivitas, dan prediksi hasil. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru dan rujukan bagi peneliti atau pihak yang membutuhkan data terkait preskripsi pengelolaan hutan lindung terkhusus Hutan Kemasyarakatan Lestari Alam di Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024 - Februari 2025 melalui dua tahapan kegiatan yaitu pengambilan data dan pengolahan data. Untuk pelaksanaan pengambilan data berlokasi di Dusun Pange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk pengolahan data dilakukan di Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kamera digital, sebagai alat dokumentasi di lapangan.
- b. Alat tulis menulis, sebagai alat yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan.
- c. Laptop, untuk mengolah data hasil wawancara.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pedoman wawancara, digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan data melalui proses wawancara terhadap responden. Dapat dilihat pada (Lampiran 1).

2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara untuk memperoleh informasi dari masyarakat di lokasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah KTH Lestari Alam dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, responden yang diambil sebanyak 20 orang dengan kriteria merupakan masyarakat yang tergabung sebagai anggota KTH yang aktif dalam pengelolaan hutan dan bersedia untuk memberikan informasi terkait penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi dan kondisi di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. Teknik ini melibatkan pencatatan dan pengamatan terhadap lahan, termasuk bagaimana memberikan rekomendasi pengelolaan hutan yang lebih baik untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil observasi didokumentasikan dengan kamera dan dideskripsikan melalui catatan lapangan sebagai bentuk pendukung data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui interaksi langsung antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan (Yudiantara *et al.*, 2021).

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa catatan lapangan penelitian, perekaman wawancara serta dokumentasi berupa gambar selama melakukan proses penelitian.

4. Pengolahan Data

Temuan-temuan pada saat observasi dan wawancara diolah membentuk dugaan-dugaan spesifik yang didiskusikan melalui beragam dokumen ilmiah dan beragam pendapat dari pembimbing penelitian. Diskusi ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan arti dari data yang telah dianalisis dan menjelaskan bagaimana hasil tersebut berhubungan dengan pertanyaan penelitian.

5. Studi Pustaka

Mengumpulkan informasi melalui skripsi, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya terkait penelitian yang dilakukan.

2.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan HKm. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Data dalam Penelitian

No.	Jenis Data	Klasifikasi	Rincian	Sumber Data
1.	Data Primer	Identitas Responden	Nama, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.	Responden
		Elemen Preskripsi	- Jenis komoditi - Aktivitas pengelolaan - Luas lahan garapan - Jumlah tanaman - Umur tanaman	Responden
2.	Data Sekunder	Data Umum	Deskripsi KTH Lestari Alam	Ketua KTH Lestari Alam
		Data Spasial	- SHP Batas Areal Kerja HKm - Data Digital Elevation Model	KPH Ajatappareng Portal INA Geoportal

(DEM) Nasional tahun 2023	
• Citra Sentinel-2 L2A/B tahun 2024	Website https://scihub.copernicus.eu/
• Data Jenis Tanah	USDA (<i>United States Departemen of Agriculture</i>)

2.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis *land use*, mengetahui apa saja penggunaan lahan dalam HKm, dimana analisis *land use* ini dilakukan dengan interpretasi citra yaitu citra Sentinel-2 L2A/B tahun 2024 yang memiliki resolusi spasial 10 meter. Interpretasi citra dilakukan secara digital dengan menggunakan metode digitasi on screen. Citra tersebut dapat diunduh melalui website <https://scihub.copernicus.eu/>. Identifikasi objek pada citra dengan memperhatikan unsur dan karakteristik citra yaitu bentuk, warna, ukuran, rona, pola dan lokasi yang disesuaikan dengan petunjuk teknis penafsiran citra dan klasifikasi tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skala 1:50.000.
2. Analisis biofisik, digunakan untuk mengetahui potensi atau kendala pada suatu wilayah, adapun aspek-aspek biofisik yaitu mencakup jenis tanah, kelerengan dan tata hutan.
3. Analisis deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan identitas responden dan elemen preskripsi pengelolaan hutan lindung yang mencakup klasifikasi lahan, *schedule* aktivitas dan prediksi hasil.
4. Analisis kuantitatif, mencakup perhitungan, pendapatan dan indikator terkait lainnya. Menurut Pribadi & Qomariyah (2021), rumus penerimaan dapat dihitung menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

Penerimaan dalam suatu usaha pertanian juga sering disebut sebagai pendapatan bruto atau nilai produksi. Penerimaan bruto petani dihitung melalui perkalian dari jumlah produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai rumus (Pribadi & Qomariyah, 2021):

$$TR = P \times Q$$

Keterangan :

TR = Penerimaan

P = Harga Barang

Q = Jumlah Barang